

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DASAR  
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**MODEL IMPLEMENTASI PROGRAM PANDU KELUARGA  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) MELALUI  
PENDEKATAN BERPIKIR SISTEM DI KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR**

**PENELITI**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Sinta ID/NPM</b>
<b>Dr. Ani Agus Puspawati, M.AP</b>	<b>Ketua</b>	<b>6679218</b>
<b>Meiliyana, S.IP, M.A,</b>	<b>Anggota</b>	<b>6680745</b>
<b>Dona Raisa Monica, SH., MH</b>	<b>Anggota</b>	<b>6161249</b>
<b>Tarisa Dwina Putri</b>	<b>Anggota</b>	<b>2056041011</b>
<b>Anjani Eka Puteri</b>	<b>Anggota</b>	<b>2016041017</b>

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG**

---

Judul Penelitian	: Model Implementasi Program Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia Melalui Pendekatan Berpikir Sistem di Kabupaten Lampung Timur
Manfaat sosial ekonomi	: Terciptanya Model Implementasi Program Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia Melalui Pendekatan Berpikir Sistem di Kabupaten Lampung Timur
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Dr. Ani Agus Puspawati, M.AP.
b. SINTA ID	: 6679218
c. Jabatan fungsional	: Lektor
d. Program Studi	: Administrasi Negara
e. Nomor HP	: 085658770020
f. Alamat surel (e-mail)	: ani.puspawati@fisip.unila.ac.id
Anggota Peneliti (1)	
a. Nama Lengkap	: Meiliyana, S.IP., MA.
b. SINTA ID	: 6680745
c. Program Studi	: Administrasi Negara
Anggota Peneliti (2)	
a. Nama Lengkap	: Dona Raisa Monica, S.H., M.H
b. SINTA ID	: 6161249
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
Mahasiswa yang terlibat (1)	
a. Nama Lengkap	: Tarisa Dwina Putri
b. NPM	: 2056041011
c. Program Studi	: Administrasi Negara
Mahasiswa yang terlibat (2)	
a. Nama Lengkap	: Anjani EkaPuteri
b. NPM	: 2016041017
c. Program Studi	: Administrasi Negara
Jumlah alumni yang terlibat	: 1
Jumlah staf yang terlibat	: 1
Mitra penelitian	: Desa Sumber Gede Lampung Timur
Lokasi penelitian	: Desa Sumber Gede Lampung Timur
Lama penelitian	: 6 Bulan

Biaya Penelitian  
Sumber dana

: Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)  
: PNBP UNILA

Bandar Lampung, 22 September 2022

Mengetahui,  
Dekan FISIP



(Dra. Ida Nurhanda, M.Si)  
NIP. 196108071987032001

Ketua Peneliti/

(Dr. Ani Agus Puspawati, M.AP.)  
NIP. 198308152010122002

Menyetujui,  
Ketua LPPM Universitas Lampung,



(Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.)  
NIP. 196505101993032008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 <i>State Of The Art</i> dan Kebaruan Penelitian.....	3
1.4 Tujuan <i>Khusus</i> .....	4
1.5 Urgensi Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>4</b>
2.1 Landasan <i>State of The Art</i> .....	4
2.2 Analisis Kebijakan Publik.....	8
2.3 Implementasi Kebijakan.....	8
2.4 Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia .....	8
2.5 Roadmap Penelitian.....	11
2.6 Kontribusi Penelitian .....	12
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>14</b>
3.1 Kerangka Operasional Penelitian .....	14
3.2 Jenis Penelitian .....	15
3.3 Fokus Penelitian .....	15
3.4 Lokasi Penelitian .....	15
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	15
3.6 Teknis Analisis Data.....	15
3.7 Indikator Capaian Terukur .....	17
3.8 Tahapan Penelitian dan Penanggungjawab .....	17
<b>BAB IV BIAYA dan JADWAL.....</b>	<b>18</b>
4.1 Anggaran Biaya.....	18
4.2 Jadwal Penelitian.....	18
<b>BAB V HASIL dan PEMBAHASAN.....</b>	<b>19</b>
5.1 Problematika keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Desa Sumbergede Kabupaten Lampung Timur .....	19
5.2 Strategi implementasi Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI).....	25
<b>REFERENSI.....</b>	<b>28</b>

## ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Provinsi Lampung pada tahun 2017-2020 terbanyak dari Kabupaten Lampung Timur yang didominasi oleh PMI perempuan. Tingginya jumlah PMI asal Kabupaten Lampung Timur disebabkan oleh kondisi ekonomi. PMI memberikan dampak negatif bagi keluarga yang ditinggalkan. Penelitian ini mengkaji secara sistematis model implementasi panduan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan Soft System Methodology (SSM).

Tujuan penelitian yaitu a) Menganalisis problematika keluarga PMI di Desa Sumbergede Kabupaten Lampung Timur. b) Membangun model implementasi Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia dengan pendekatan Soft System Methodology (SSM).

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Tahapan diawali dengan menganalisis problematika keluarga PMI di Desa Sumbergede Kabupaten Lampung Timur. Kemudian dilakukan pengambilan data primer dan data sekunder melalui wawancara, observasi dan dokumentasi ke lokasi penelitian. Selanjutnya kompilasi teori dan data. Teori yang dikompilasi meliputi teori analisis kebijakan, teori implementasi kebijakan dan panduan keluarga PMI. Tahap selanjutnya menganalisis dengan SSM dan FGD hingga terbangun “Model Implementasi Program Pandu Keluarga PMI melalui pendekatan Berpikir Sistem di Kabupaten Lampung Timur”.

Implementasi PAKEM dapat berjalan dengan optimal jika terdapat data riil mengenai keluarga PMI yang ditinggalkan, tidak hanya jumlah PMI yang berangkat. Koordinasi secara intensif dan kolaborasi harus dilakukan di internal Satgas PAKEM dan membangun relasi dengan pihak luar seperti organisasi pemerhati keluarga PMI.

Luaran yang ditargetkan adalah a) Laporan akhir dan laporan keuangan penelitian. b) Hasil penelitian akan dipublikasikan. c) Makalah akan dipresentasikan pada pertemuan ilmiah yang diselenggarakan LPPM UNILA.

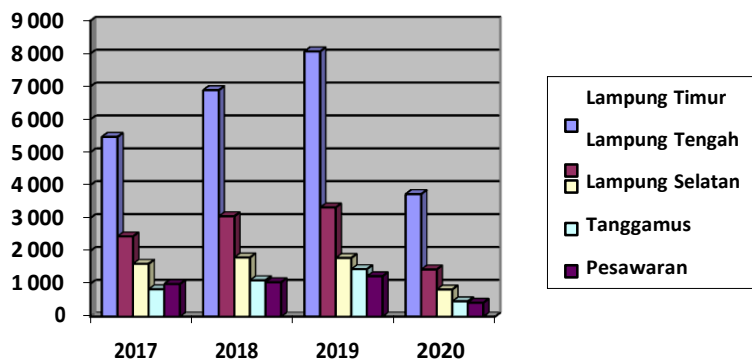
**Kata Kunci: Pandu Keluarga PMI, SSM**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pada kurun waktu empat tahun 2017-2020 Pekerja Migran Indonesia (PMI) didominasi oleh Kabupaten Lampung Timur. Kabupaten Lampung Timur menjadi kantong PMI di Provinsi Lampung. Persebaran PMI yang berasal dari Provinsi Lampung jumlah terbanyak berasal dari Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Tanggamus, dan Pesawaran.

**Gambar 1. Data Jumlah PMI asal Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2020**



Sumber : Data BP2MI, 2020

Tabel 1 menyatakan angka PMI di Provinsi Lampung pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 masih didominasi oleh PMI perempuan.

**Tabel 1 Data PMI Provinsi Lampung Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2020**

No	Jenis Kelamin	2017	2018	2019	2020
1	Laki-laki	3.586	5.033	5.216	1.856
2.	Perempuan	11.785	13.810	16.249	7.336
	Total	15.371	18.843	21.465	9.192

Sumber : Data BP2MI, 2020

Tingginya jumlah PMI, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Timur memberikan sebuah dampak. Baik itu dampak yang sifatnya positif maupun dampak yang sifatnya negatif (Ndarujati, 2021). Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, pola penggunaan remitansi yang terjadi di Desa Sumbergede Lampung Timur yaitu pola konsumtif. Masyarakat cenderung menggunakan remitansi untuk hal-hal konsumtif. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang terjadi karena pada akhirnya banyak PMI yang kembali untuk bekerja ke luar negeri.

Dengan tingginya PMI yang bekerja ke luar negeri maka akan memberikan dampak negatif yang ditinggalkan. Terlebih karena sebagian besar PMI didominasi oleh wanita, maka hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi keluarga yang ditinggalkan. Wanita yang bekerja sebagai PMI harus meninggalkan keluarga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang diberikan. Status wanita sebagai PMI terlebih wanita yang telah berkeluarga memiliki dampak terhadap keutuhan keluarganya (Anggraini et al, 2020).

Realita yang terjadi lebih banyak ibu yang menjadi PMI dibanding ayah, pada akhirnya menyebabkan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab ayah. Namun dalam pelaksanaannya kebanyakan dari ayah yang bersangkutan kurang begitu cakap dalam mengasuh anak dan mengurus rumah tangga. Sehingga pengasuhan anak dibebankan kepada kerabat terdekat seperti nenek/kakek, paman/bibi ataupun sanak saudara yang lain. Peran dalam pengasuhan yang dilakukan oleh kerabat seringkali cenderung kurang maksimal. Anak yang diasuh oleh kerabat terdekat seperti kakek/nenek justru kerap menunjukkan perilaku yang bermasalah (maladaptif), mengalami gangguan emosional, dan bahkan tidak patuh pada pengasuh. Hal ini merupakan akibat dari kurang sesuainya pola pengasuhan yang diberikan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan model pengasuhan yang tepat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk diterapkan pada anak pekerja migran (Nurannisa et al., 2017).

Unit Pelaksana Teknis BP2MI Bandar Lampung berupaya untuk memberikan alternatif solusi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menginisiasi sebuah program yang bersinergi dengan Pemerintah Desa Sumbergede Lampung Timur. Bentuk inisiasi yang dilakukan oleh UPT BP2MI Bandar Lampung adalah program standar pola pengasuhan yang seharusnya dilakukan oleh keluarga PMI yang ditinggal bekerja ke luar negeri.

Program yang diinisiasi oleh UPT BP2MI Bandar Lampung adalah **Program Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PAKEM) Indonesia**. Program ini bersinergi antara UPT BP2MI dan beberapa aktor diantaranya Pemerintah Desa Sumbergede, PKK, Tokoh Agama dan Karang Taruna, Kabupaten Lampung Timur sebagai stakeholder dari program ini. Dalam implementasinya program PAKEM Indonesia mengalami beberapa kendala. Ahmad, et.all, (2012), Carter (2014) *gap implementation* terjadi karena kurangnya kontinuitas dalam kebijakan, korupsi, alokasi keuangan minim, kurangnya pelatihan sumber daya manusia, kurangnya kepemimpinan visioner, kurangnya kemauan politik dari pihak pemerintah, tindak lanjut yang buruk, sistem pemantauan buruk, evaluasi kebijakan buruk, pendekatan sentralistik dalam implementasi, kurangnya stabilitas politik dan disiplin institusional yang buruk.

Aminuzzaman (2013), faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi adalah partisipasi masyarakat dan *stakeholder*; adanya perspektif jangka panjang dan visi; keberlanjutan pemerintah; peraturan yang mendukung; sinergi antara aturan. Dari uraian tersebut, kesamaan visi dan kolaborasi sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini mengkaji problematika keluarga PMI dan membuat model implementasi program PAKEM Indonesia di Desa Sumbergede.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana problematika keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Desa Sumbergede Kabupaten Lampung Timur?
- b. Bagaimana model implementasi Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan pendekatan *Soft System Methodology*?

## **1.3 State Of The Art dan Kebaruan Penelitian**

Kebaruan penelitian ini adalah membangun model implementasi Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan pendekatan berpikir sistem.



#### **1.4 Tujuan Khusus**

- c. Menganalisis problematika keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Desa Sumbergede Kabupaten Lampung Timur.
- d. Membangun model implementasi Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia dengan pendekatan *Soft System Methodology*

#### **1.5 Urgensi Penelitian**

- a. Melakukan identifikasi problematika keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Sumbergede Kabupaten Lampung Timur.
- b. Terbentuknya model implementasi Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan pendekatan *Soft System Methodology*.
- c. Hasil penelitian dipublikasikan dalam The 3rd Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS).
- d. Makalah dipresentasikan pada pertemuan ilmiah yang diselenggarakan LPPM UNILA.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan State of The Art

Landasan *state of the art* merupakan beberapa contoh penelitian terdahulu yang berfungsi untuk analisis dan memperkaya pembahasan penelitian serta membedakannya dengan penelitian yang pernah dilakukan. Dalam penelitian ini disertakan beberapa judul jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan konsep penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

**Tabel 1. State of the art**

No	Judul Jurnal dan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Profesi Tenaga Keja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang (Sulthon, 2016)	Tingginya tingkat perceraian disebabkan oleh masalah komunikasi antara TKI dengan pasangannya yang tidak dilakukan secara konsisten
2.	Peran Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Malang Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Purna di Kabupaten Malang (Susanti dan Arinto, 2018)	perlindungan bagi PMI purna yang telah dilakukan oleh SBMI Malang yaitu penyelesaian kasus dan pemberdayaan pengetahuan ekonomi, namun belum menerapkan mekanisme pelaksanaan pemberdayaan yang terstruktur dan sistematis. Kendala yang dihadapi DPC SBMI Malang dalam melakukan pemberdayaan, yaitu izin dari keluarga, anggaran dana yang belum mencukupi, dan sarana prasarana yang belum memadai.
3.	Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKW di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar (Sutiana, dkk., 2018)	pola asuh otoriter, demokratis, maupun permisif. Pada dasarnya pola asuh tersebut lebih bersifat campuran. Hal ini ditinjau dari perlakuan wali terhadap anak meliputi pengelolaan keuangan, pemenuhan pendidikan, dan pemenuhan hak anak dalam berkomunikasi dengan orangtua.
4.	Paradigma Baru Model Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Prespektif Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 (Widiyahseno, dkk., 2018)	secara yuridis dan administratif ada perubahan yang signifikan terhadap perlindungan para Pekerja Migran Indonesia. Namun secara praksis belum bisa dipastikan memberikan dampak yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari indikasi bahwa sampai sekarang Pemerintah belum menerbitkan Peraturan Pemerintahnya, begitu juga belum ada daerah yang menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di masing-masing wilayahnya.

5.	Pemberdayaan Mantan Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Desmigratif (Studi di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang) (Mindarti dan Putri, 2019)	Proses pemberdayaan mantan pmi melalui program Desmigratif. Kendala dalam pemberdayaan mantan PMI yaitu minimnya pengetahuan mantan PMI dan minat.
6.	Pemenuhan Hak-hak Pekerja Migran Asal Sulawesi Selatan di Malaysia dalam Prespektif Ekonomi Politik (Zulfikar, 2019)	Pelaksanaan pemenuhan hak-hak migran pada masa pra penempatan dan masa penempatan yang dilaksanakan dengan benar akan signifikan bagi peningkatan ekonomi TKI/PMI. Semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang terkait prosedur yang legal, semakin berkurang TKI/PMI yang menempuh jalur ilegal/ non prosedural.
7.	Strategi Implementasi Perlindungan Anak Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Lampung Timur dalam Prespektif <i>Good Governance</i> (Indriyati, dkk., 2019)	Dalam perlindungan anak keluarga TKI dibutuhkan data pendukung, kolaborasi antar stakeholder dan dukungan public.
8.	Problematika Pendidikan di Perbatasan: Studi Kasus Pendidikan Dasar bagi Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Bahagian Sarawak, Malaysia (Handoyo dan Reza, 2020)	Melalui kerjasama antar aktor dalam memberikan bantuan pemenuhan pendidikan dasar kepada anak PMI yang berda di Sarawak, Malaysia. Bentuk kerjasama ini tidaklah permanen sehingga kedepannya harus muncul gagasan dan kebijakan yang baru.
9.	Pelindungan Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Erizal, dkk., 2020)	Secara keseluruhan subjek pelindungan yang diatur hanya sebatas CPMI/PMI. Adapun mengenai standar pelindungan keluarga PMI dalam konvensi ILO 1990 meliputi, Perlindungan hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Stndar tersebut belum diadopsi secara komperhensif dalam UUPPMI.
10.	Potret Pergeseran Relasi Gender dan Dampaknya Bagi Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Zuhriyah, dkk., 2020)	Dalam kasus ini, konsep patriarki tidak berlaku lagi. Suami mulai berperan di sektor domestik; memasak, mengurus anak, dan mengerjakan segala hal ihwal rumah tangga. Sedangkan istri, hanya berperan untuk memenuhi nafkah keluarga, entah sebagai pembantu rumah tangga, mengurus orang tua jompo maupun di sektor lainnya di luar negeri. Hal demikian tidak hanya berimplikasi kepada faktor material-ekonomi saja melainkan juga secara psikologis dan sosiologis; terjadi kompleksitas problem keluarga yang dampaknya bisa sampai pada rusaknya hubungan rumah tangga dan pendidikan anaknya.

11.	Diplomasi Indonesia dalam Menangani Masalah Pendidikan Anak TKI di Sabah Malaysia (Hartati dan Rofi'atul, 2020)	Ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan anak-anak PMI di Sabah Malaysia ini antara lain, membentuk SIKK, Community Learning Center (CLC), mengirimkan guru bina, dan membantu pengadaan dokumen kependudukan
12.	Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (Suatu Penelitian di Banda Aceh) (Anwar, 2020)	penerapan penempatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) PMI Aceh oleh BP3TKI belum maksimal, dikarenakan banyaknya PMI Aceh yang berangkat ke luar negeri secara ilegal sehingga data PMI tidak tercatat secara resmi. Upaya yang dilakukan oleh BP3TKI adalah dengan memberi sosialisasi pentingnya menjadi PMI yang resmi dan memberikan pembekalan dan pemahaman kepada CPMI
13.	Pelaksanaan Program Demigratif Sebagai Upaya Pengurangan Jumlah Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (Putri dan Arinto, 2020)	Pelaksanaan program Demigratif dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program Demigratif di Desa Arjowilangun sudah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat pelaksanaan program Demigratif, yang kemudian disiasati dengan upaya-upaya yang akan dilakukan demi mengurangi kendala tersebut.
14.	Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Kecamatan Ngatru Kabupaten Tulungagung (Umami, 2020)	Peran keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung Berdasarkan analisis komponen-komponen literasi keuangan syariah yang mana menghasilkan 28,6% dari informan mempunyai tingkat literasi keuangan syariah yang masih tergolong rendah atau less literate, sedangkan 71,4% dari informan tidak mempunyai literasi keuangan syariah atau not literate.
15.	Gerakan Edukasi Perkembangan Anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Melalui Metode Parenting (Adawiyah, dkk., 2020)	melalui program gerakan edukasi parenting telah mengintegrasikan program dengan mensosialisasikan bahwa metode parenting sebagai penguat keluarga dikala kehadiran orang tua tidak lengkap pada saat melakukan pengasuhan. Dengan menggunakan metode ini beberapa produk yang dihasilkan diantaranya adalah Games Therapy Sentra Seni Anak Pameran Family Fun Day Edukasi parenting.
16.	Analisis Pemanfaatan Remitansi dan Tingkat Konsumsi Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Suruhan Lor Kecamatan Bandung Tulungagung (Pramesti, 2020)	Terdapat perbedaan keluarga pekerja migran Desa Suruhan Lor dalam pemanfaatan remitansi yang dikirim oleh keluarganya yang berada diluar negeri. Remitansi tersebut dimanfaatkan sebagai kebutuhan konsumtif dan produktif. Keluarga migran Desa Suruhan Lor cenderung bersifat konsumtif yang kadang disalah artikan oleh keluarga pekerja migran untuk memeperlihatkan hasil kerja keluarga mereka untuk ajang persaingan. Adapun pola

		Konsumsi dalam ekonomi Islam yaitu meskipun banyak yang bersifat konsumtif para keluarga pekerja migran Indonesia tersebut selalu memperhatikan prinsip konsumsi dalam Islam. Kata Kunci: pemanfaatan remitansi, Tingkat konsumsi, ekonomi Islam
17.	Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan (Ndarujati, 2021)	Indonesia mendirikan Kantor Perdagangan Republik Indonesia (IETO) yang merupakan lembaga ekonomi non-pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi Indonesia dan Taiwan. Peran lembaga tersebut dalam mengatasi masalah pekerja migran Indonesia terdiri dari perumusan kebijakan dan melakukan pengawasan , menjamin pemenuhan hak calon pegawai, membangun dan mengembangkan sistem informasi, untuk penempatan calon pegawai imigran.
18.	Peran Guru pada Pengasuh Anak dari Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (Rahmaningrum dan Pujiyanti, 2021)	pola pengasuhan permisif merupakan yang mayoritas diterapkan kepada anak yang berdampak pada aspek sosial emosional, bahasa, dan kognitif. Peran serta guru pada pengasuhan adalah dengan memberikan pendekatan dan edukasi terhadap pengasuh dan juga anak. Terdapat perubahan secara perlahan ke arah positif terhadap pengasuhan. Terdapat perubahan secara perlahan terhadap perkembangan anak.
19.	Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Pekerja Migran dalam Perspektif Fiqih Hadhanah (Studi Kasus Blitar) (Ayesta, 2021)	Pemenuhan hak anak oleh orang tua pekerja migran di blitar dalam dalam hal pengasuhan dan hal finansial sudah berjalan secara baik, walaupun orang tua bekerja diluar negeri namun peran pengganti mampu menggantikan peran ibu kandung secara maksimal. Berbeda dalam hal pendidikan anak, kurangnya edukasi yang didapatkan oleh anak yang mengakibatkan pendidikan anak tidak berjalan dengan baik.

**Sumber: Diolah Peneliti, 2022**

## **2.2 Analisis Kebijakan Publik**

Menurut Dunn (2003) analisis kebijakan diambil dari bermacam disiplin ilmu dan profesi dengan tujuan yang bersifat deskriptif, evaluatif dan preskriptif. Harapannya adalah dapat menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal terkait tiga pertanyaan yaitu nilai yang pencapaiannya merupakan tolok ukur utama untuk melihat apakah masalah dapat teratasi; fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai; tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai. Untuk menghasilkan informasi dan argumen yang masuk akal mengenai tiga pertanyaan tersebut, dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan, yaitu: empiris, valuatif dan normatif.

Analisis kebijakan dapat dilaksanakan dengan beberapa bentuk (Dunn, 2003) yaitu: (a) prospektif: mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum kebijakan diterapkan; (b) retrospektif: dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan, biasa disebut model valuatif; (c) integratif, bentuk perpaduan antara analisis kebijakan prospektif dan retrospektif.

## **2.3 Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya (Edward III,1980). Dunsire (1978) dalam Ahmad (2012) membahas mengenai beberapa gejala tentang implementasi dan menamakannya sebagai *implementation gap*, yaitu suatu keadaan dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang dicapai. Perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada aktor kelompok organisasi sebagai implementor (Williams, 1971;1975 dalam Ahmad, 2012).

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1981) dalam Agustino (2019) dukungan publik sangat berperan dalam implementasi, bisa berasal dari media massa, pejabat daerah atau kelompok kepentingan. Keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan dukungan dari instansi- instansi atasan, perhatian publik dan perhatian media.

## **2.4 Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia**

Pakem Indonesia atau Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia

mengkombinasikan antara kampanye atau diseminasi informasi menjadi pekerja migran prosedural di desa dan workshop untuk memandu keluarga pekerja migra Indonesia untuk mendukung perkembangan anak mereka demi meningkatkan ketahanan keluarga. Pakem Indonesia akan berkolaborasi bersama dengan berbagai pihak agar program ini dapat berkesinambungan di desa sekaligus memberikan model program yang dapat dilakukan di desa dalam pertanggungjawabannya dalam upaya perlindungan kepada PMI dan keluarganya.

Sesuai amanat UU No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia pasal 42 menyatakan secara jelas tentang tugas dan tanggungjawab pemerintah desa. Pakem Indonesia menggandeng pemerintah desa untuk memberikan wacana baru bagi program desa yang peka terhadap PMI dan keluarganya. Selain itu, program ini dapat membantu pemerintah desa dalam proses diseminasi informasi ketenagakerjaan ke luar negeri dan melakukan pemberdayaan kepada PMI dan keluarganya melalui kegiatan pendidikan orangtua atau pengasuh dalam pengasuhan atau parenting mendukung ketahanan keluarga mereka.

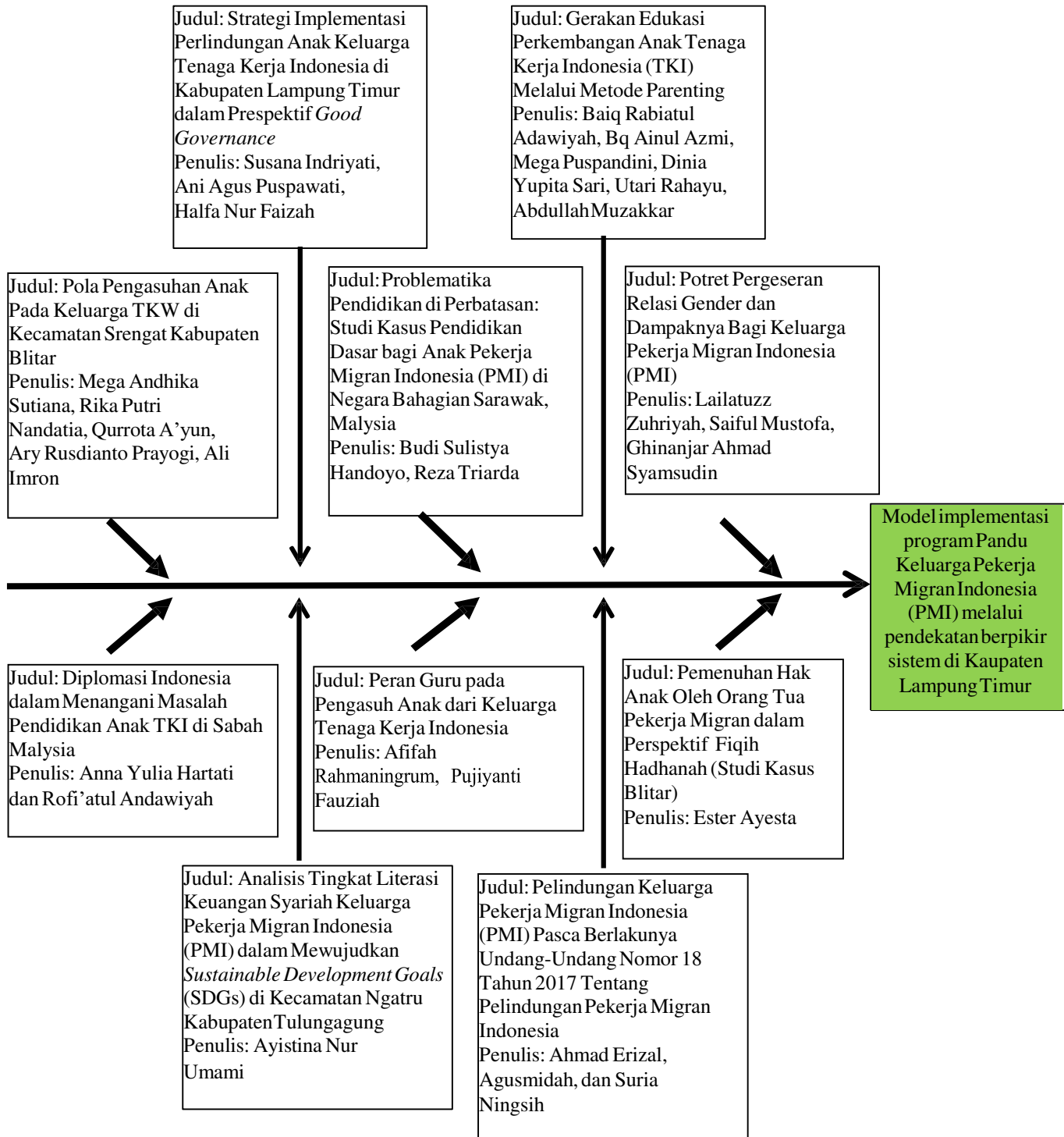
Selain dengan pemerintah desa, pakem Indonesia juga berkolaborasi dengan pakar parenting, anggota PKK (anggota pemberdayaan kesejahteraan keluarga), karang taruna, dan juga aktivis buruh migran yaitu SBMI. Kegiatan ini bersinergi dengan berbagai pihak dengan tujuan agar dapat berkesinambungan dilakukan oleh desa secara mandiri karena pihak-pihak yang berkolaborasi bersama akan langsung dilatih sebagai mentor ikut serta selama kegiatan berlangsung (kepala desa, anggota PKK, karang taruna).

Program ini menggunakan kurikulum Guiding Good Choices (GGC). Kurikulum GGC dikembangkan oleh Dr. David Hawkins dan Dr. Richard Catalano dari University of Washington untuk orangtua dari anak-anak usia 9-14 tahun. Anak-anak PMI yang ditinggalkan oleh orangtua mereka bekerja ke luar negeri tak lepas dari resiko memiliki perilaku bermasalah. Mereka diasuh oleh salah satu orangtua atau orangtua pengganti (nenek/bibi/kerabat lainnya). Anak-anak dihadapkan pada resiko di sekolah, komunitas, teman sebaya, dan terkadang dalam keluarga mereka. Beberapa anak mulai mengonsumsi alkohol, rokok, obat-obatan terlarang, putus sekolah, free sex, atau terlibat dalam kenakalan atau kekerasan. Anak-anak lainnya, meskipun menghadapi resiko yang sama tidak memiliki masalah perilaku remaja seperti ini karena mereka dilindungi oleh faktor-faktor seperti ikatan keluarga yang kuat, gaya hidup sehat, serta memiliki standar perilaku yang jelas di keluarganya. Dalam program ini, orangtua atau pengasuh dan mentor akan belajar cara memperkuat ikatan keluarga, menetapkan standar keluarga yang jelas, mengajari

anak-anak keterampilan yang mereka perlukan untuk membuat pilihan yang baik dan meningkatkan keterlibatan anak dalam keluarga.



## 2.5 Roadmap Penelitian



Keterangan:

- Kajian penelitian terdahulu
- Rencana penelitian 2022

**Gambar 2. Roadmap Penelitian**

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

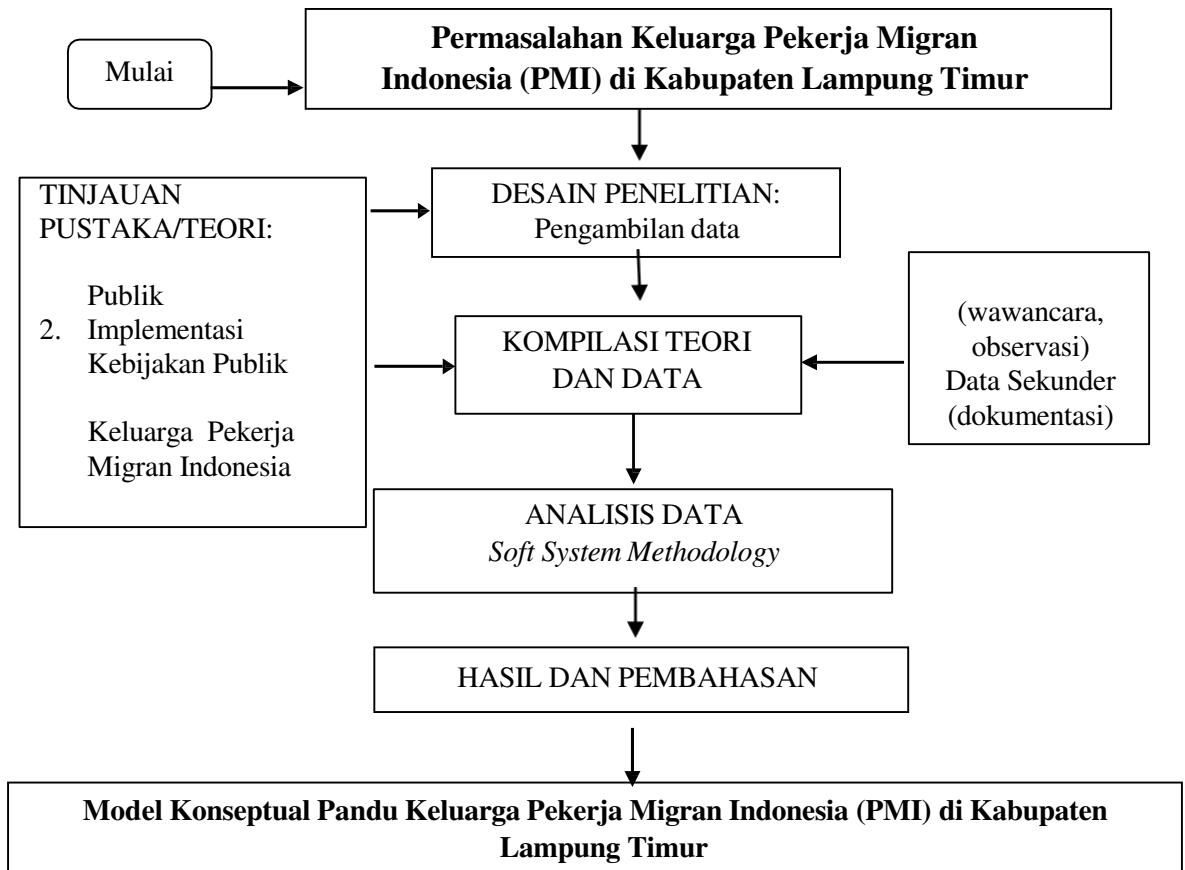
## **2.6 Kontribusi Penelitian**

- a. Hasil penelitiannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu mengembangkan konsep dan teori kebijakan publik khususnya yang berkaitan dengan analisis kebijakan pada tahap implementasi, serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Kontribusi bagi Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai salah satu pelaksana kebijakan terkait keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain itu, diharapkan memberi kontribusi bagi NGO, swasta dan masyarakat agar dapat berkolaborasi.
- c. Kontribusi dalam pengembangan metodologi penelitian yang berbasis kebijakan “Panduan Keluarga Pekerja Migran Indonesia” dengan berpikir sistem

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Kerangka Operasional Penelitian

**Gambar 3 Kerangka Operasional Penelitian**



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022

Berdasarkan bagan alur di atas, penelitian dengan judul “**Model Implementasi Program Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Melalui Pendekatan Berpikir Sistem di Kabupaten Lampung Timur**” diawali dengan mengkaji permasalahan keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Lampung Timur. Kemudian dilakukan pengambilan data primer dan data sekunder melalui wawancara, observasi dan dokumentasi ke lokasi penelitian. Selanjutnya kompilasi teori dan data. Teori yang dikompilasi meliputi teori analisis kebijakan, teori implementasi kebijakan dan kebijakan Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tahap selanjutnya menganalisis dengan SSM hingga terbangun “Model Konseptual Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Lampung Timur”

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2016: 4-5), penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sebagian besar orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

### **3.3 Fokus Penelitian**

- a. Analisis permasalahan implementasi Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI).
- b. Model Konseptual Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan pendekatan *Soft System Methodology*.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sumbergede, Kabupaten Lampung Timur.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menurut Emzir (2011):

- A. Observasi dilakukan pada *stakeholder* yang terlibat dalam Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia.
- B. Wawancara. Wawancara dilakukan kepada seluruh *stakeholder*.
- C. Dokumen.

### **3.6 Teknis Analisis Data**

Menurut Checkland dan Scholes (1990), SSM merupakan metode yang berbasis pada berfikir sistem. SSM merupakan pendekatan iteratif untuk menggambarkan masalah *soft*. Masalah *soft* merupakan masalah yang melibatkan elemen sosial dan politis yang membuat identifikasi dan penyelesaian masalah menjadi kabur.



### 3.7 Indikator Capaian Terukur

1. Indikator capaian terukur adalah dikenalnya permasalahan dan faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya dengan berpikir sistem membuat skenario model konseptual pandu keluarga migran Indonesia di Kabupaten Lampung Timur
2. Mahasiswa yang terlibat sudah seminar hasil penelitiannya.

### 3.8 Tahapan Penelitian dan Penanggungjawab

**Tabel 1. Tahapan Penelitian**

<b>Tahap</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Petugas</b>
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan kajian Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI)</li><li>• Pengumpulandata primer dan sekunder melalui wawancara,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketua</li><li>• Mahasiswa</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menganalisis informasi mengenai Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Lampung Timur.</li><li>• Observasi serta wawancara tambahan untuk pematapan hasil.</li><li>• Mengidentifikasi model dan FGD</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketua dan Anggota</li><li>• Mahasiswa</li><li>• Ketua dan tim</li></ul>
3	Membangun model konseptual Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Lampung Timur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketua dan tim</li></ul>

**BAB IV**  
**BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN**

**4.1 Anggaran Biaya**

Berikut ini ringkasan anggaran biaya penelitian

**Tabel 2. Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian**

NO	Komponen Biaya	Biaya yang Diusulkan
1	Pengadaan alat dan bahan	Rp 7.550.000,00
2	Biaya perjalanan	Rp 5.000.000,00
3	Alat tulis kantor/ bahan habis pakai	Rp 2.450.000,00
4	Laporan/Diseminasi/Publikasi	Rp 10.000.000,00
<b>TOTAL</b>		Rp 25.000.000,00

**4.2 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini direncanakan selama 6 bulan dengan rencana kegiatan yang tersusun dalam tabel 4 berikut ini:

**Tabel 3. Kerangka Operasional Pelaksanaan Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan Ke					
		1	2	3	4	5	6
1	<b>Persiapan</b>						
A	Perizinan dan administrasi surat menyurat	√					
B	Penelusuran data sekunder dan pembuatan proposal	√	√				
C	Penyusunan/ pemetaan masalah		√				
2	<b>Pelaksanaan</b>						
A	Identifikasi kondisi riil dan pemetaan masalah		√				
B	Observasi dan wawancara mendalam			√	√		
C	Pengolahan hasil lapangan			√	√		
D	Analisis data			√	√	√	
E	Penulisan luaran (Artikel nasional dan internasional)				√	√	√
3	<b>Penyusunan Proposal</b>						
A	Penyusunan laporan kemajuan					√	
B	Penyusunan laporan akhir					√	√
C	Submit publikasi dan pelaksanaan seminar hasil						√

## **BAB V**

### **HASIL dan PEMBAHASAN**

#### **5.1 Problematika keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Desa Sumbergede Kabupaten Lampung Timur**

Pekerja migran dapat didefinisikan sebagai angkatan kerja dan/atau tenaga kerja yang sudah memiliki pekerjaan di luar negeri. Definisi *migrant worker* tersebut sesuai dengan definisi luas dari PBB (Hamid, 2019). Definisi mengenai *migrant worker* mengacu kepada Konvensi ILO pada Buruh Migran tahun 1949, yaitu orang yang bermigrasi dari suatu negara ke negara lain untuk tujuan bekerja (Khuana, 2020). Sementara dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Pekerja Migran Indonesia (PMI) didefinisikan sebagai setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Terjadinya proses migrasi dipengaruhi dengan adanya faktor yang melatarbelakanginya. Faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan migrasi adalah adanya *push and pull factors*. Kedua faktor tersebut menjadi faktor pendorong terjadinya migrasi dan faktor penarik terjadinya migrasi. Faktor yang menjadi pendorong untuk melakukan migrasi adalah sejumlah faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk meninggalkan negara asal, sedangkan faktor penarik adalah sejumlah faktor yang mempengaruhi arus masuk migrasi (Haryono, 2017).

Menurut (Haryono, 2017) faktor pendorong terjadinya migrasi yaitu karena adanya dorongan ekonomi yang melatarbelakanginya. Beberapa faktor pendorong terjadinya proses migrasi diantaranya adalah upaya untuk meningkatkan standar hidup, kualitas pendidikan, serta ketertarikan adanya fasilitas yang jauh lebih baik bagi pekerja migran. Meningkatnya ketimpangan (*inequality*) antar negara yang dilihat sebagai insentif yang turut berperan dalam menambah keinginan pekerja migran untuk keluar dari negara asalnya. Sehingga hal tersebut menjadi penyebab terjadinya migrasi khususnya bagi negara berkembang menuju negara maju.



Sementara yang menjadi faktor penarik terjadinya migrasi terbagi menjadi beberapa faktor. Pertama, tingginya permintaan imigrasi dikarenakan kondisi demografi yang terjadi di negara maju yang cenderung menunjukkan penurunan angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk yang rendah. Kedua, adanya permintaan tenaga kerja ahli di negara maju. Ketiga, meningkatnya *rekrutmen* tenaga kerja kontrak untuk mengisi posisi pada pelayanan jasa dari perusahaan asing yang memiliki cabang di luar negeri. Keempat, peningkatan tren *outsourcing*, khususnya pada perekrutan tenaga kerja kontraktual di suatu perusahaan yang ada di luar negeri (Haryono, 2017).

Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) angka pekerja migran dari tahun ke tahun, jumlahnya mengalami fluktuasi yang cenderung mengalami peningkatan. Bahkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Orberta jr et al dalam (Noveria, 2017) akibat dari banyaknya PMI yang bekerja di luar negeri, menjadikan Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penyumbang tenaga kerja migran internasional terbesar dikawasan Asia. Dengan tingginya sumbangan pekerja migran, hal ini menjadikan Indonesia dalam sembilan negara pengirim tenaga kerja terbanyak yang ada di Asia (Noveria, 2017). Data BP2MI pada periode tahun 2017-2020 yang bekerja ke luar negeri baik pada sektor formal maupun sektor non-formal menunjukkan bahwa adanya fluktuasi jumlah pekerja migran indonesia.

Peningkatan jumlah PMI yang bekerja ke luar negeri sebanyak 20.741 pada periode tahun 2017-2018. Dengan rincian pada tahun 2017 jumlah pekerja migran sebanyak 262.899 orang meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 283.640 pekerja migran atau jika dihitung dalam jumlah persentase maka peningkatan jumlah pekerja migran pada tahun 2017 sampai dengan 2018 telah terjadi peningkatan sebesar 7,8%. Sementara pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 justru terjadi penurunan angka pekerja migran sebesar 7.087. Dengan rincian jumlah pekerja migran pada tahun 2018 sebanyak 283.640 menjadi sebanyak 276.553 pekerja migran pada tahun 2019. Dengan kata lain apabila dihitung dalam persentase maka pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 telah terjadi penurunan sebesar 2,5% (BP2MI, 2020).

Selanjutnya pada tahun 2020 angka PMI kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sebanyak 276.553 PMI menjadi 113.173 PMI atau telah terjadi penurunan sebesar 59% dari tahun sebelumnya akibat dari adanya pandemi covid-19.

Persebaran PMI yang berasal dari Provinsi Lampung jumlah terbanyak yaitu berada di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Tanggamus, dan Pesawaran. Dari data tersebut menunjukkan bahwa persebaran jumlah PMI yang berasal dari Provinsi Lampung tidak merata. Dalam kurun waktu empat tahun mulai dari tahun 2017-2020 masih didominasi oleh Kabupaten Lampung Timur. Kabupaten Lampung Timur dapat dikatakan menjadi kantong PMI di Provinsi Lampung. Secara keseluruhan jumlah PMI yang berasal dari Provinsi Lampung cenderung mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2020 yang mengalami penurunan sebagai dampak dari adanya pandemi.

Angka PMI di Provinsi Lampung pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 masih didominasi oleh PMI perempuan. Secara rinci persentase jumlah PMI asal Provinsi Lampung berdasarkan tabel di atas yaitu pada tahun 2017 jumlah persentase pekerja perempuan sebesar 76,6 % sementara persentase jumlah pekerja laki-laki sebesar 23,4%, tahun 2018 jumlah persentase pekerja perempuan sebesar 73% sementara jumlah pekerja laki-laki sebesar 27%, tahun 2019 jumlah persentase pekerja perempuan sebesar 75% sementara jumlah persentase pekerja laki-laki sebesar 25%, dan pada tahun 2020 jumlah persentase pekerja perempuan sebesar 79% sementara jumlah persentase pekerja laki-laki sebesar 21%.

**Tabel 4 Data PMI Lampung Timur Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2020**

No	Sektor	2017	2018	2019	2020
1.	Laki-laki	1.451	1.978	2.107	812
2.	Perempuan	4.023	4.916	5.974	2.915
	Total	5.474	6.894	8.081	3.727

Sumber: UPT BP2MI Bandar Lampung, 2020

Berdasarkan data tabel 4 jumlah PMI yang berasal dari Lampung Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan sebelum adanya pandemi. Sementara jumlah tenaga kerja yang bekerja sebagai PMI masih didominasi oleh perempuan. Setiap tahunnya angka pekerja migran mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat pada tiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang terjadi.

Tingginya antusias yang terjadi, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Timur untuk bekerja ke luar negeri pada akhirnya memberikan sebuah dampak. Baik itu dampak yang sifatnya positif maupun dampak yang sifatnya negatif. Dampak positif dari tingginya antusias masyarakat untuk dapat bekerja ke luar negeri yaitu dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi negara dari sektor sumbangan devisa yang diberikan oleh PMI dari pengiriman remitansi (Ndarujati, 2021).

Menurut (Dibyantoro, 2014) penggunaan remitansi oleh PMI memiliki beberapa pola. Berdasarkan atas prioritas penggunaan, pola penggunaan remitansi memiliki dua pola yaitu pola penggunaan remitansi produktif dan pola penggunaan remitansi konsumtif. Pola penggunaan remitansi produktif terbentuk karena penggunaan remitansi lebih ditujukan untuk prioritas penggunaan yang sifatnya dalam jangka panjang seperti *investasi* pada bidang pertanian dengan melakukan pembelian tanah atau digunakan sebagai biaya pendidikan bagi anak. Pola penggunaan remitansi konsumtif terbentuk karena adanya prioritas penggunaan yang terkait dengan kebutuhan rumah tangga keluarga atau yang sifatnya dalam jangka yang pendek bagi PMI itu sendiri seperti pembelian kendaraan, renovasi rumah, dan pembayaran hutang (Dibyantoro, 2014).

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, pola penggunaan remitansi yang terjadi di Desa Sumbergede Lampung Timur yaitu pola konsumtif. Masyarakat cenderung menggunakan remitansi untuk hal-hal konsumtif seperti membeli barang, merenovasi rumah, membayar hutang dan lain sebagainya. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang terjadi karena pada akhirnya banyak PMI yang kembali untuk bekerja ke luar negeri, dikarenakan penggunaan remitansi yang tidak dikelola dengan baik.

Dengan tingginya PMI yang bekerja ke luar negeri maka akan memberikan dampak negatif yang ditinggalkan. Terlebih karena sebagian besar PMI didominasi oleh wanita, maka hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi keluarga yang ditinggalkan. Wanita yang bekerja sebagai PMI harus meninggalkan keluarga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang diberikan. Status wanita sebagai PMI terlebih wanita yang telah berkeluarga memiliki dampak terhadap keutuhan keluarganya (Anggraini et al., 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Zainal (Sekdes Sumbergede), angka perceraian keluarga PMI di Desa Sumbergede cukup tinggi. Berdasarkan data yang yang diperoleh, angka perceraian PMI yang ada di Sumbergede mencapai 80%. Hal ini menunjukkan bahwa PMI yang bekerja ke luar negeri juga rentan terhadap keutuhan keluarga yang bersangkutan. Keluarga yang tidak utuh rentan menimbulkan berbagai persoalan baru khususnya mengenai persoalan psikologi dan sosial.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Puspitawati & Setioningsih, 2011) anak-anak yang ditinggalkan oleh orangtua yang bekerja sebagai PMI cenderung lebih banyak mengalami permasalahan psikososial. Beberapa permasalahan psikososial yang terjadi seperti gangguan emosional pada anak, kecenderungan anak yang sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan, hiperaktif, cenderung lebih pasif dalam setiap menghadapi permasalahan, dan yang terberat adalah terjadinya stres dengan kategori tinggi yang dialami oleh anak (Puspitawati & Setioningsih, 2011).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspitawati & Setioningsih, 2011) fenomena mengenai kecenderungan anak PMI yang mengalami permasalahan psikososial terjadi juga di Desa Sumbergede. Berdasarkan data hasil wawancara dengan Sekdes Desa Sumbergede permasalahan pada anak PMI seperti kurang optimalnya pengasuhan bagi anak, anak yang mulai mengenal pergaulan bebas sehingga mulai merokok, mengonsumsi miras dan kenakalan remaja lainnya. Selain itu karena lebih banyak ibu yang menjadi PMI dibanding ayah, pada akhirnya menyebabkan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab ayah. Namun dalam pelaksanaannya kebanyakan dari ayah yang bersangkutan kurang begitu cakap dalam mengasuh anak dan mengurus rumah tangga. Sehingga pengasuhan anak dibebankan kepada kerabat terdekat seperti nenek/kakek, paman/bibi

ataupun sanak saudara yang lain. Peran dalam pengasuhan yang dilakukan oleh kerabat seringkali cenderung kurang maksimal. Anak yang diasuh oleh kerabat terdekat seperti kakek/nenek justru kerap menunjukkan perilaku yang bermasalah (maladaptif), mengalami gangguan emosional, dan bahkan tidak patuh pada pengasuh. Hal ini merupakan akibat dari kurang sesuainya pola pengasuhan yang diberikan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan model pengasuhan yang tepat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk diterapkan pada anak pekerja migran (Nurannisa et al., 2017).

Peran yang dilakukan oleh orangtua yang bertindak sebagai seorang pekerja migran tidak hanya sebatas mengenai pemenuhan atas hak dasar dari anak. Pemenuhan hak dasar yang dimaksud adalah hanya memberikan pemenuhan atas makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Melainkan peran yang dilakukan juga harus mencakup atas pemenuhan aspek psikologis dan sosial bagi anak secara optimal. Peran yang dilakukan oleh orangtua dalam hal pemenuhan aspek psikologi dan sosial ini yang akan berdampak pada tumbuh kembang anak (Widyarto & Rifauddin, 2020).

Meskipun orangtua tidak dapat secara langsung melakukan pengawasan karena harus menjadi pekerja migran, namun hal ini bukan berarti orangtua lalai dalam memberikan pengasuhan dan cenderung memanjakan anak. Sikap lalai dan memanjakan yang dilakukan dalam pola pengasuhan kepada anak maka akan berdampak pada rendahnya tingkat kompetensi sosial yang terjadi pada anak. Sehingga menyebabkan anak akan memiliki sikap yang kurang baik seperti tidak dewasa, lemahnya kontrol diri, kecenderungan sulit untuk dapat menghargai orang lain dan bahkan dalam kasus yang lebih ekstrim akan menunjukkan perilaku kenakalan remaja (Widyarto & Rifauddin, 2020). Kasus seperti ini banyak terjadi di daerah basis PMI. Berbagai permasalahan ini terjadi juga disalah satu kantong PMI yang ada di Provinsi Lampung, tepatnya yaitu di Desa Sumber Gede, Kabupaten Lampung Timur.

## **5.2 Strategi implementasi Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI)**

Unit Pelaksana Teknis BP2MI Bandar Lampung berupaya untuk memberikan alternatif solusi permasalahan keluarga PMI. Hal ini dilakukan guna mengatasi permasalahan agar dampaknya tidak terjadi secara berkepanjangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menginisiasi sebuah program yang bersinergi dengan Pemerintah Desa Sumbergede Lampung Timur. Bentuk inisiasi yang dilakukan oleh UPT BP2MI Bandar Lampung adalah program standar pola pengasuhan yang seharusnya dilakukan oleh keluarga PMI yang ditinggal bekerja ke luar negeri.

Program yang diinisiasi oleh UPT BP2MI Bandar Lampung tersebut diberi nama program Pakem Indonesia. Program Pakem Indonesia atau yang merupakan kepanjangan dari Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah sebuah program yang bersinergi antara UPT BP2MI dan beberapa aktor lain yang ikut terlibat. UPT Bandar Lampung selaku inisiator, *berkolaborasi* dengan beberapa pihak lain untuk dapat merealisasikan program ini. Beberapa aktor yang terlibat dalam program ini diantaranya Pemerintah Desa Sumbergede, PKK Desa Sumbergede, Tokoh Agama Sumbergede dan Karang Taruna Desa Sumbergede, Kabupaten Lampung Timur sebagai stakeholder dari program ini. Program ini merupakan salah satu bentuk perwujudan atas perlindungan sosial bagi PMI dan keluarganya (Mubarika, 2020).

Program Pakem Indonesia merupakan sebuah program yang berasal dari proyek hibah mikro pada tahun 2020. Program ini muncul dari sebuah *Non-Governmental Organization* (NGO) yang berasal dari *American Council of Young Political Leader* (ACYPL) yang berhasil diraih oleh salah satu pengantar kerja UPT BP2MI Bandar Lampung. Program ini diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat atau *United States Department of State*. Kegiatan yang ada dalam program ini yaitu mempelajari tentang berbagai program sosial bagi keluarga PMI khususnya dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga bagi PMI. Konsep Program Pakem Indonesia diadopsi dari Program *Young Southeast Asian Leaders Initiative* (YSEALI) 2019 yang mana program tersebut diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat atau *United States Department of State* (Mubarika, 2020).

Program ini secara jelas mengatur tentang tata cara pemberdayaan kelompok marjinal khususnya yang ada di Amerika Serikat, yaitu kalangan imigran dan pengungsi. Mengingat program Pakem Indonesia ini mengadopsi program *YSEALI* maka kurikulum yang digunakan dalam program ini pun menggunakan kurikulum yang hampir sama. Kurikulum yang digunakan dalam program ini yaitu kurikulum *Guiding Good Choices* (GGC) yang dikembangkan oleh *University of Washington*. UPT BP2MI Bandar Lampung selaku penanggung jawab dalam program ini tidak sebagai aktor tunggal, melainkan juga melibatkan *stakeholder* lain sebagai aktor dalam setiap penyelenggaraan program tersebut (Mubarika, 2020). Strategi yang dapat dilakukan dalam mewujudkan keberhasilan program adalah:

1. Satgas PAKEM Desa Sumber Gede melengkapi data mengenai kondisi keluarga PMI yang ditinggalkan. Tidak hanya jumlah PMI yang berangkat, gambaran kondisi keluarga sangat diperlukan untuk memudahkan mapping masalah dan mencari solusi yang tepat.
2. Masing-masing *stakeholder* membangun komunikasi dan relasi antar aktor sesuai dengan kapasitas dan wewenang yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa Sumbergede bertindak sebagai aktor pelaksana atau *Level Street Bureaucracy* dari program yang dibantu dengan beberapa perangkat desa seperti PKK, Karang Taruna, dan Tokoh Agama. Sementara peran UPT BP2MI dalam program ini adalah sebagai inisiator program, yang selanjutnya dalam proses pelaksanaan program ini UPT BP2MI berperan dalam hal *monitoring* terkait dengan proses pelaksanaan program. Peran antar-aktor begitu penting dalam melakukan sinergi dalam proses pelaksanaan program ini. Agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan efektif maka perlu memperhatikan secara serius dalam proses implementasinya. Khususnya dari para implementor utama pelaksana program dalam hal ini Pemerintah Desa Sumbergede dan UPT BP2MI Bandar Lampung sebagai pihak yang melakukan *monitoring* program.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ulfa (inisiator program), program Pakem Indonesia merupakan program *pilot project*. Definisi *pilot project* merujuk pada pelaksanaan kegiatan proyek percontohan yang dirancang sebagai pengujian atau trial dalam rangka untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program, mengetahui dampak pelaksanaan program dan keekonomisannya. Menurut Setiawan (2014), bagi sebagian institusi pemerintah yang memiliki struktur organisasi yang sangat besar dan tersebar, metode *pilot project* ini relatif sulit untuk dilaksanakan. Selain itu, dengan sumber daya baik waktu dan anggaran yang terbatas atas pelaksanaan uji coba tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif (Setiawan & Emirisa, 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zainal (Sekdes Sumbergede), salah satu permasalahan dalam proses pelaksanaan program Pakem Indonesia adalah berkaitan dengan anggaran. Hal itu dikarenakan dalam proses pelaksanaan dari program ini pemerintah desa menggunakan alokasi anggaran dari dana desa. Pemerintah Desa Sumbergede harus membagi anggaran dana desa dengan skala prioritas yang dilakukan. Sehingga pemerintah desa sedikit mengalami kendala dalam proses pelaksanaan program dikarenakan terbatasnya anggaran yang dapat dialokasikan. Oleh karena itu faktor anggaran menjadi salah satu faktor penyebab dari terkendalanya program ini. Oleh karena itu, pemenuhan sumber daya perlu diupayakan dengan membangun partisipasi semua pihak.

Dengan mengacu kepada solusi yang diberikan oleh BP2MI Bandar Lampung melalui program Pakem Indonesia dalam upaya memberikan ketahanan keluarga PMI, seorang *decision maker* dapat mengambil kebijakan terkait prioritas *pilot project* pada implementasi program Pakem Indonesia yang baru dikembangkan secara obyektif berdasarkan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan model *Integrated Implementation Model* teori yang dikemukakan oleh Soren C Winter. Dalam hal ini yang berkaitan dengan beberapa aspek implementasi program Pakem Indonesia seperti dari segi Perilaku Organisasi dan Antar-Organisasi atau *Organizational and Inter-Organizational behavior*, Perilaku Level Bawah atau *Street Level Buraucratic Behavior* dan Perilaku Target Sasaran atau *Target Group Behavior* (Rahmawati et al., 2020).



## REFERENSI

- Andhika Sutiana, M. et al., (2018). *Pola Pengasuhan Anak pada Keluarga TKW di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Jurnal Paradigma Vol.6 No 1.*
- Agustino, L. (2019). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)* (Edisi Revi). Alfabeta.
- Ahmad, Iqbal et.all., (2012). *Implementation Gaps in Educational Policies of Pakistan: Critical Analysis of Problems and Way Forward. International Journal of Humanities and Social Science Vol. 2 No. 21.*
- Aminuzzaman, Salahuddin M. (2013). *Dynamics of Public Policy: Determinants of Policymaking and Implementation in Bangladesh.* Public Organiz Rev (2013) 13:443–458.
- Ayesta, Ester. (2021). *Pemenuhan Hak Anak oleh Orang Tua Pekerja Migran dalam Perspektif Fiqih Hadhanah (Studi Kasus Blitar).* Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Checkland, Peter B. and Scholes, J. (1990). *Soft Systems Methodology in Action.* England: John Wiley & Sons Ltd.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Edisi 4). Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua.* Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy.* Washington: Congressional Quarterly Press.
- Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Erizal, Ahmad. et all., (2020). *Perlindungan Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Law Jurnal Vol. 1 No.1.*
- Handoyo, Budi Sulistya. dan Triarda, Reza. (2020). *Problematika Pendidikan di Perbatasan: Studi Kasus Pendidikan Dasar Bagi Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Bahagian Sarawak, Malaysia. Jurnal Transformasi Global Vol.7 No.2.*
- Rabiatul Adawiyah, Baiq. et all., (2020). *Gerakan Edukasi Perkembangan Anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Melalui Metode Parenting. Jurnal Pelita PAUD Vol. 5 No.1.*
- Rahmaningrum, Afifah. dan Fauziah, Pujiyanti. (2021). *Peran Guru Pada Pengasuhan Anak dari Keluarga Tenaga Kerja Indonesia. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol.5 No.2.*

Umami, Ayustina Nur. (2020). *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.